MAKALAH

MANAJEMEN ZISWAF

BAZNAS DAN LAZNAS UU NO.23 TAHUN 2011

DISUSUN OLEH :

- SELMIANA SALAM 90500119083
- NABILA PUTRI ISLAMY 90500119071
- RANGGA YUDISTIRA 90500119086

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah serta taufik-Nya kepada penulis, sehingga makalah yang telah saya tulis dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang bersangkutan yang telah memberikan kesempatan waktu untuk penyelesaian makalah ini dan dengan limpahan rahmat karunia Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah mata kuliah ini.

Dengan ditulisnya makalah ini, diharapkan para pembaca dapat mengetahuiterhadap tentang “**BAZNAS Dan LAZNAS UU NO.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**” serta dapat menjadi pengembangan wawasan dan mengerti akan beberapa referensi-referensi dari beberapa sumber.

Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan dan kekhilafan.Oleh karena itu, kepada para pembaca dan para pakar, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah yang saya susun bermanfaat bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A.Latar Belakang	4
C. Tujuan Masalah	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
1.Defenisi BAZNAS menurut UU NO 23 Tahun 2011.....	6
2.Sejarah Singkat LAZNAS Chveron Distric-Rumbai Pekan baru.....	12
3. Visi dan Misi LAZNAZ.....	13
5.Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat	17
PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah (*al-barakah*), tumbuh (*al-nama'*), suci, baik, dan bersihnya (*al-thaharah*). Secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang ALLAH SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan yang tertentu pula.

Zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang – orang fakir dan golongan lainnya yang berhak menerima dengan syarat – syarat khusus.¹

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban dari setiap muslim yang tergolong mampu untuk membayar zakat dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima zakat. pada pengelolaan zakat yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu termasuk Rukun Islam yang keempat, sesudah syahadatain, shalat, puasa, dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*Hablum Minan Naas*), di samping (*Hablum Mina Allah*), dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan Jemaah (Negara).²

Sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Apa defensis baznas menurut UU NO 23 Tahun 2011?
2. Apa defensi Sejarah Singkat LAZNAS Chveron Distric-Rumbai Pekan baru?
3. Apa saja Visi dan Misi LAZNAZ?
4. Apa saja sistensi Lembaga Amil Zakat di Indonesia?
5. Apa saja Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui defensis baznas menurut UU NO 23 Tahun 2011
2. Untuk mengetahui Sejarah Singkat LAZNAS Chveron Distric-Rumbai Pekan baru
3. Untuk mengetahui Visi dan Misi LAZNAZ
4. Untuk mengetahui sistensi Lembaga Amil Zakat di Indonesia
5. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

BAB II

PEMBAHASAN

1. Defenisi BAZNAS menurut UU NO 23 Tahun 2011

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.¹

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh

¹Shauqi Dhaif, Kitab Al – Mu’jam Al – Wasith, Maktabah Shurouq Ad – Dauliyyah , Mesir, 2011, Hal 396.

Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan pada Pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

² Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Muladi dan Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*”, Sinar Grafika , Jakarta, 2000, Hal 130

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;

2. Pendayagunaan untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri.

Terjaminnya pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya profesionalitas pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Pengumpulan zakat menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 angka 2 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan untuk pengelolaan zakat secara daerah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah. Sedangkan angka 3 menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan angka 4 menjelaskan bahwa Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu Pengumpulan zakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama, meningkatkan fungsi dan peranan peraturan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat itu sendiri.

Pasal 18 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menjelaskan bahwa Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - a. melakukan pemeriksaan wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat;
 - b. melakukan kajian secara partisipatif bersama Mustahik terhadap usulan program; dan
 - c. melakukan wawancara kepada calon Mustahik dan calon lembaga pengelola;
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Zakat yang berwenang di wilayah domisili Mustahik.

Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila kebutuhan dasar Mustahiq sudah terpenuhi;
- b. Memenuhi ketentuan syariah;
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk Mustahiq;
- d. Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat.

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengendalian.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk upaya mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, diperlukan adanya pengelolaan zakat secara optimal, profesional dan bertanggung jawab yang dapat dikelola masyarakat bersama pemerintah. Undang – Undang tentang pengelolaan zakat yang berazaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 15 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011, menjelaskan tentang Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
- b. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- c. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- d. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- e. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 39 yang menerangkan bahwa :

“BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.” Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Periode 2017 – 2020 yang dihadiri oleh Pejabat Struktural dan Fungsional pada tanggal 2 Mei 2017 bertempat di aula Lantai 2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kudus Noor Badi, mengatakan tentang Zakat sudah jelas diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sekarang tinggal bagaimana menyikapinya, sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya ditulis ASN) di jajaran Kementrian Agama Seharusnya dapat memelopori dan dapat mengamalkan Zakat sehingga BAZNAS dikabupaten Kudus bisa berkembang dan tidak hanya berjalan ditempat. Badan Amal Zakat Daerah (yang disebut BAZDA) dibentuk oleh

Bupati Kudus pada Tahun 2015, namun karena belum ada regulasinya maka belum bisa berjalan. Untuk mensikapi hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus mengambil langkah membentuk Pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan sususnan pengurus terdiri: Pembina, Penasehat ketua, Sekertaris, Bendahara dan Anggota, untuk itu beliau mengharap agar draf yang berisi tugas dan kewajiban para pengurus dapat dicermati dengan baik.³

Di Kabupaten kudus masih banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan, dan oleh karena itu dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten kudus, dapat dilakukan pengelolaan zakat dan nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerima dan membutuhkan. Berikut data penduduk miskin Kabupaten Kudus.

2. Sejarah Singkat LAZNAS Chveron Distric-Rumbai Pekan baru⁴

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga yang memfokuskan kesungguhan dalam menjalankan kewajibannya, yakni bersungguh-sungguh kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pebayaraan zakat dan bersungguh-sungguh kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang brtumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infak, sedekah dan waqaf (ZISWAF) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan karyawan muslim Chevron yang meliputi semua Distric-Chevron di Indonesia. Lembaga amil zakat nasional (LAZNas) Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru sendiri telah lama tumbuh dan berkembang di Distric Rumbai dengan nama PIZSA (pengumpul zakat dan sedekah) pada tahun 1994, oleh pemuda BBQ yang terdiri dari Meslim Roesli sebagai penggagas ide pertama untuk mendirikan PIZSA, dan rekan-rekan lainnya yaitu: Deswandi Muzwar, Agus Jamil, Tafsil Lison dan Iman Jamad sebagai penasehat Masjid.⁶² Pada masih dilakukan di masjid, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya. Seiring

³ St.Zul/Bd, "Rakor Pembentukan Pengurus Unit Pengumpulan Zakat", rakor-pembentukan-pengurus-unit-pengumpul zakat-upz (3/9/2018, 12:51:58 Wib).

⁴ Hasil wawancara dengan Divisi Program LazChev Rumbai pada 17 juni 2020 pukul 11.00-13.30 WIB

waktu, pengumpulan zakat sudah bisa melalui rekening PIZSA, dana yang terkumpul berasal dari gaji karyawan yang dipotong 2,5%, juga dari dana yang lainnya serta bekerja sama dengan bendahara Chevron itu sendiri. Dari pengumpulan tersebut juga dilakukan pemotongan 10% yang akan dikirimkan ke pusat, dari 8 cabang Chevron, yaitu: Duri, Dumai, Minas, Rumbai, Balikpapan, Bogor, Garut, Jakarta. Nama dari pengumpulan zakat kini tidak lagi PIZSA, juga tidak dilakukan di masjid, dari tahun 1997 hingga kini dilakukan di kantor.

3. Visi dan Misi LAZNAZ

1. Visi

a. LAZNAS Indonesia:

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Nasional yang dipercaya Muzakki Karyawan Muslim dan Mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta Muzakki dan mengangkat derajat Mustahik.⁵

b. LAZNAS Rumbai:

Bersinergi dengan Stakeholder dan Lembaga-lembaga lain yang ada, berijtihad dan berikhtiar mewujudkan target kerja:

- a) Kecamatan Rumbai & Rumbai Pesisir Bebas Miskin di tahun 2017
- b) Kota Pekanbaru Bebas Miskin dari tahun 2017 hingga 2027
- c) Propinsi Riau Bebas Miskin setelah 2027⁶

2. Misi⁶

Sebagai Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, LAZNas Chevron Rumbai akan menjalankan misi kerja :

- a) 3 M, yaitu : Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan.
- 4 M, yaitu : Mengubah Mustahik Menjadi Muzaki

4. Eksistensi Lembaga Amil Zakat di Indonesia

⁵ Hasil wawancara dengan Divisi Program LazChev Rumbai pada 22 November pukul 11.00-13.30 WIB

⁶ Risal Bungkaes, J. H. Posumah, et. Al 2013.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat,¹⁶ yang notabene dibentuk atas prakarsa pemerintah. Secara yuridis, definisi LAZ dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.⁷

Setelah Undang-Undang ini diubah, definisi LAZ turut mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁸ Melalui definisi ini, peran yang dimainkan oleh LAZ turut berubah, yaitu sebagai pembantu dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Perkembangan LAZ sebagai institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia, dapat dibagi menjadi tiga periode: Pertama, Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁸ Pengumpulan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sejak Islam masuk ke Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam.

⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115

Pada awal kemerdekaan pengelolaan zakat masih diserahkan pada masyarakat. Baru pada tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, yang intinya pemerintah mendorong masyarakat secara aktif mengawasi pendistribusian zakat agar sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, pemungutan dan pen distribusi zakat belum dilakukan oleh sebuah lembaga dan masih bersifat sporadis. Pada tahun 1968, muncul dua institusi yang berhubungan erat dengan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 dan bait al-mâl yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968. Berdasarkan dua PMA ini Bait al-mâl berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian dikumpulkan kepada Badan Amil Zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq. Bait al-mâl yang dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968 berstatus yayasan dan bersifat semi resmi.¹⁹ Dua peraturan ini memberikan peluang lahirnya sejumlah Lembaga Amil Zakat di Indonesia seperti Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) pada tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta, Yayasan Dana Sosial alFalah (YDSF) pada tanggal 1 Maret 1987 di Surabaya, dan Dompot Dhuafa Republika pada 14 September 1994 di Jakarta.⁹

Kedua, Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hukum Islam semakin mendapatkan tempat dalam proses legislasi setelah dilakukan reformasi. Pada tahun 1999, Pemerintah beserta DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.²⁰ Melalui Undang-Undang ini, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan, atau institusi lain nya diakui dan mendapat perlindungan hukum, dengan catatan harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Sebagaimana dalam

⁹Fakhruddin, Fiqh, h. 244-245

Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ketiga, Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selama 12 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak sedikit persoalan yang muncul dalam proses pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Undang-Undang ini dinilai memiliki banyak kekurangan dan amat ringkas. Selain itu, Undang-Undang ini hanya menyebutkan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana. Berdasarkan hal ini, pada tahun 2007 Forum Zakat dan BAZNAS menyusun konsep amandemen Undang-undang Pengelolaan Zakat dan diajukan ke DPR.

Menurut Ahmad Juwaini, ada tiga isu sentral yang diusung dalam draft revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat : Pertama, adanya sanksi bagi muzakki yang ingkar, baik sanksi administrasi maupun sanksi finansial; Kedua, Penataan organisasi pengelola zakat dan pemisahan fungsi regulator atau pengawas, operator dan kordinator; Ketiga, menjadikan Zakat sebagai pengurang pajak.¹⁰Noor Aflah mengatakan bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia tidak memiliki struktur pengendalian yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai operator yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, tanpa ada lembaga pengawas. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih yang memicu distrust terhadap LAZ. Dalam RUU Pengelolaan Zakat, BAZNAS diposisikan sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia, seperti peran Bank Indonesia dalam dunia perbankan. Setidaknya ada dua sebab perubahan posisi ini, (1) fungsi pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama dipandang tidak efektif, karena banyaknya tugas dan tanggungjawab yang diembannya. (2) Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden.¹¹ tiga pandangan yang berbeda: Pertama, Pandangan yang menolak penggabungan. Hamy Wahjunianto – mantan ketua umum Forum

¹⁰ Ahmad Juwaini, Mencermati dan Menyikapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, (Online) (www.forumzakat.net, diakses tanggal 18 Mei 2012)

¹¹ Noor Aflah, *Arsitektur*, h. 2-4

Zakat - menyatakan bahwa LAZ merupakan bentuk partisipasi positif masyarakat yang perlu didukung, bukan sebaliknya.¹² Publik lebih percaya kepada LAZ daripada BAZ dalam menyalurkan zakat, infak, atau shadaqahnya. Hal ini terbukti dari capaian dana yang diperoleh LAZ jauh lebih besar dari dana yang dikelola BAZ. Jumlah donatur dan muzakki yang menjalin kemitraan dengan LAZ juga semakin bertambah. Jika LAZ dan BAZ digabung apakah pemerintah menjamin bahwa para donatur dan muzakki mau menyalurkan ZIS kepada BAZ. Optimalisasi fungsi pengelolaan zakat bukan dengan menggabungkan dua lembaga tersebut. Melainkan memberikan ruang gerak yang luas bagi LAZ untuk menjalankan fungsinya. Penggabungan bisa dilakukan setelah terbentuk lembaga pengawas pengelolaan zakat dan adanya standarisasi mutu lembaga zakat.

5. Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah di Indonesia. Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator. Peran yang dimainkan LAZ hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. LAZ dengan BAZ memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹³

¹² Noor Aflah, *Arsitektur*, h. 13-22

¹³ Fakhruddin, *Fiqh*, h. 253-254

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Jika dalam Undang-Undang yang lama posisi kedua nya dipandang sejajar dan seimbang dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat, dalam Undang-Undang yang baru ini peran LAZ menjadi dikerdilkan dan diposisikan sebagai subordinat dari BAZ yang dibentuk oleh pemerintah. Pergeseran inilah yang ditentang oleh LAZ-LAZ yang tergabung dalam Forum Zakat, bahkan ada wacana untuk melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun instrumen yang keberlakuannya, yaitu Peraturan Pemerintah diberi tenggat satu tahun.¹⁴ Adapun perbandingan skema hubungan peran antara BAZ dan LAZ dalam Undang-Undang 38 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut: Skema relasi BAZ dan LAZ dalam UU. 38 Tahun 1999

Skema relasi BAZ dan LAZ dalam UU. 21 Tahun 2011

¹⁴ Abdul Mukthie Fadjar, Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, makalah disampaikan dalam forum kuliah umum dan konsultasi publik “Mengkritisi UU 23/2011”, tanggal 12 April 2012 (Malang, Universitas Brawijaya, 2012), h. 1

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga yang memfokuskan kesungguhan dalam menjalankan kewajibannya, yakni bersungguh-sungguh kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pebayaraan zakat dan bersungguh-sungguh kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infak, sedekah dan waqaf (ZISWAF) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan karyawan muslim Chevron yang meliputi semua Distric-Chevron di Indonesia.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

B. Saran

Adapun upaya laznas dalam menangani proses penyaluran zakat tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Karena proses penyaluran zakat tersebut tentunya memiliki kendala dalam mencari alamat mustahik dan lain sebagainya.

Harusnya lebih baik lagi dalam proses penyaluran dana zakat yang diberikan ke mustahik tersebut. Kepada pengurus atau amil zakat laznas chevron rumbai harus memiliki komitmen terus menerus tanpa henti, karena di dunia terus terjadi perubahan, sehingga ada ungkapan „tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri“. Oleh karena itu agar tidak terlindas zaman, perlu adanya perbaikan manajemen zakat nya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan

DAFTAR PUSTAKA

Shauqi Dhaif, Kitab Al – Mu’jam Al – Wasith, Maktabah Shurouq Ad – Dauliyyah , Mesir, 2011, Hal 396.

Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Muladi dan Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*”, Sinar Grafika , Jakarta, 2000, Hal 130-131.

St. Zul/Bd, “Rakor Pembentukan Pengurus Unit Pengumpulan Zakat” , <https://jateng.kemenag.go.id/berita/berita/detail/rakor-pembentukan-pengurus-unit-pengumpul-zakat-upz> (3/9/2018, 12:51:58 Wib).

Hasil wawancara dengan Divisi Program LazChev Rumbai pada 17 juni 2020 pukul 11.00-13.30 WIB

Hasil wawancara dengan Divisi Program LazChev Rumbai pada 22 November pukul 11.00-13.30 WIB

Risal Bungkaes, J. H. Posumah, et. al. “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”. Journal Acta Diurna Volume 2, Nomor 2. 2013.

Ahmad Juwaini, *Mencermati dan Menyikapi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Online) [www. forumzakat.net](http://www.forumzakat.net), diakses tanggal 18 Mei 2012

al-Qardhawi, Yusuf. *Dauru al-Zakat fi ‘ilaj al- musykilat al-Istishadiyah*, terj. Sari Nurilita. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2011*, (Online) www.baznas.or.id, diakses tanggal 17 Mei 2012
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia* www.bps.go.id, diakses tanggal 17 Mei 2012
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: IMZ, 2004
- Fakhruddin, "Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq", *Makalah* disampaikan dalam *international guest lecture "Manajemen Zakat Kontemporer Malaysia-Indonesia*, tanggal 10 Maret 2012 Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*.
Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*.
Jakarta: Kencana, 2006.
- Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Malang Press, 2010.
- Multifiah, *Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (*Social Sciences*), Volume 21 Nomor 1, Februari, 2009.
- Didin Hafhifuddin..(et al.), *Problematika Zakat Kontemporer : Arikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (jakarta : Forum Zakat, 2003), Cet,
- I Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003)
- Didin hafidhudin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: gema insane, 2002) Eka Prihatin, *Manajemen Peserta didik*, (Bandung, ALFABETA, 2011)
- Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press) Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006